

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang menuntut segala aspek perubahan mengakibatkan, tergerusnya nilai-nilai, karakter, akhlak dan sikap individu ke arah lebih bebas, yang mengakibatkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan diterima di masyarakat, hal inilah yang mengakibatkan bergesernya karakter yang baik menjadi sesuatu yang kurang baik, karena kemajuan zaman juga modernitas. Sebab itu pendidikan sebagai *filter* atau penyaring dia akan selalu memberikan pencerahan seperti yang di ungkapkan oleh Brownhill dan Smart (1989, hlm.1) dalam bukunya *Political Education*, bahwa pendidikan *designed to turn people towards the light*, untuk menghantarkan individu atau orang ke kecemerlangan. Inilah hakikat filosofis yang mana dalam prosesnya individu akan digodog didalam pendidikan, yang secara dari kosongnya pengetahuan sampai terisinya jiwa jasmani dan rohani oleh pengetahuan pendidikan tersebut. yang baik dan buruk dan pendidikan pula yang menjadi tameng suatu bangsa.

Menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah pengembangan kurikulum 2013 lebih diarahkan pada pendidikan yang mengembangkan sikap dan karakter. Dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang dijadikan acuan bagi guru dalam kehidupan sehari-hari siswa, tentunya perkembangan sikap yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kurikulum 2013 dalam mengimplementasikan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah dan terintegrasi pada pembelajaran pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4). Didalam pengembangannya sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) diperlukan selain faktor internal seperti sekolah juga dibutuhkan faktor eksternal seperti dukungan dari keluarga, lingkungan dan teman. Karena itu pengembangan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) bisa menjadi acuan sebagai salah satu pembentukan sikap dan karakter sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi yang semakin hari kian mengkhawatirkan.

Soleh Solahudin, 2018

**UPAYA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIKAP SPIRITUAL (KI-1) DAN SIKAP SOSIAL (KI-2)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sesuai hasil revisi kurikulum 2013 bahwa penilaian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) sudah ditiadakan disetiap mata pelajaran, hanya pelajaran agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, Sesuai buku panduan penilaian oleh Pendidikan dan satuan pendidik untuk jenjang SMP halaman 47. Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar, diketahui bahwa KD (Kompetensi Dasar) dari sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) hanya ada pada mata pelajaran PPKn dan Agama, sedangkan pada mata pelajaran lainnya tidak dikembangkan KD (Kompetensi Dasar). Penilaian sikap pada mata pelajaran PPKn dan Agama akan diturunkan dari KD (Kompetensi Dasar) pada sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) namun sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) tetap dicantumkan pada setiap RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Dengan demikian harus ada upaya atau *effort* yang lebih keras lagi dari guru PPKn dan Agama, khususnya guru PPKn yang menilai dan mengaplikasikan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam pembelajaran secara langsung (*Direct Learning*) dan secara tidak langsung (*Indirect Learning*), dimana guru memberikan stimulus pembelajaran yang disisipkan dengan materi yang akan diajarkan demi terwujudnya warganegara yang baik dan siswa dapat mengaplikasikanya ketika terjun di masyarakat.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan diatas bahwa guru PPKn harus mengimplementasikan sikap spiritual (KI-1) dan sikap (KI-2) baik melalui dokumen yang telah dirancang seperti silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) bahkan diluar dua dokumen tersebut melalui kait mengkaitkan mata pelajaran PPKn dengan dua sikap tersebut dan dapat pula melalui program-program yang sekolah buat seperti pembiasaan.

Hasil Pra Penelitian yang dilakukan di SMPN 5 Bandung yang langsung mewawancarai guru PPKn, dimana guru PPKn di SMPN 5 Bandung hanya memiliki 3 guru PPKn, salah satu objek wawancara adalah guru PPKn Kirana Eka Putri, S.Pd, bahwa dalam hal peimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) mengatakan bahwa sudah menerapkan sesuai instruksi yang dimaksudkan oleh Kurikulum 2013, dimana didalam mata pelajaran PPKn ini guru lebih ke penerapan dan penilaian sikap dibanding dengan kognitif, beliau mengatakan bisa

sampai 70% untuk penilaian sikap dan 30% untuk pemahaman atau kognitif, hal ini dilaksanakan mengingat pentingnya mata pelajaran PPKn yang berbasis karakter. Dan diharapkan juga pra penelitian ini sampai pada tahap penelitian secara komprehensif, baik studi dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dibuat oleh guru, dan wawancara dan observasi guru dan kelas.

Salah satunya menurut Robert Coles (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2014, hlm 157) menyimpulkan bahwa

“terdapat variabel moderator penghubung antara tayangan tindakan kekerasan di televisi terhadap perilaku anak. Jadi, kualitas keluarga yang sangat menentukan bagaimana dampak siaran televisi terhadap perilaku anak. Menurut Coles, keluarga yang berkualitas adalah adanya pedoman atau pegangan nilai etik moral yang sepenuhnya dijunjung tinggi. Dalam keluarga seperti ini, orang tua menjadi model bagi anak-anaknya, sehingga anak tidak rawan oleh *the corruption of television screen*”

Sehingga efek dari tontonan sangat mempengaruhi jiwa seseorang apalagi anak kecil yang masih dalam tahap perkembangan.

Efek yang timbul adalah Perilaku anak-anak / peserta didik semakin hari semakin aneh hal ini dipengaruhi oleh efek adanya kemajuan teknologi, globalisasi dan lainnya, sehingga perilaku peserta didik juga dipengaruhi apa yang ia diperlihatkan atau dipertontonkan, Menurut Bandura (dalam Suyono dan Hariyanto, 2013: 65)

Bahwa perilaku individu tidak semata-mata refleksi otomatis terhadap stimulus (*S-R Bond*), melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Dalam hal belajar sosial atau pembelajaran sosial terjadi melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh perilaku (*modeling*)

Pernyataan Bandura bisa ditelisik pada zaman sekarang, interaksi individu dengan lingkungan dapat mempengaruhi kepribadian atau personal seseorang, peniruan dan contoh perilaku yang baik tentunya adalah keinginan setiap orang. Tetapi, jika dilihat dari perkembangan dunia pendidikan yang mana perilaku yang tidak sesuai semestinya, oleh karena itulah dibutuhkan guru yang menjadi model dan bisa menerapkan dan memfasilitasi antara materi dengan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2).

Pendidikan dalam aplikasinya mengindikasikan bahwa pendidikan adalah wahana pembentukan kepribadian manusia dalam hal ini pembentukan karakter yang bagus dan mempunyai sikap yang layak sebagaimana layaknya orang yang terdidik, didalam pendidikan tentunya ada mata pelajaran yang lebih menitik beratkan masalah karakter atau sikap yang harus ditonjolkan bukan hanya semata pengetahuan atau ranah kognitif, salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Ini juga salah satu munculnya dorongan dikeluarkan kurikulum 2013. Menurut Majid (2014, hlm. 112) “Faktor faktor dikembangkannya Kurikulum 2013 yakni untuk menjawab tantangan baik dari internal, eksternal, penyempurnaan pola fikir serta penguatan tata kelola Kurikulum”. Lebih lanjut urgensi dilakukannya pengembangan Kurikulum sebagaimana pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode sebelumnya, yakni Muhammad Nuh adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman agar tidak menciptakan generasi yang “usang” namun menciptakan generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi ditambahkan bahwa “tidak ada Kurikulum yang abadi” (Mulyasa, 2006, hlm 15).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37 “... dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang berpusat pula pada ranah afeksi menjadikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengemban posisi berat, terutama guru, guru harus bisa mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan bernilai moral yang baik, Kurikulum

Soleh Solahudin, 2018

**UPAYA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIKAP SPIRITUAL (KI-1) DAN SIKAP SOSIAL (KI-2)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual (KI-1) yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial (KI-2) yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual (KI-1) sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial (KI-2) sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.

Pendidikan Kewarganegaraan yang juga berbasis nilai, moral atau (A.Toyibin dan Kosasih Djahiri, 1991: 6) sebagai program Pendidikan Nilai – Moral (afektif) maka tentunya sangat diharapkan agar program mampu menampilkan perangkat tatanan nilai, moral dan norma Pancasila secara benar dan selalu menunjukkan keterkaitan isi pesan sila-sial Pancasila. Jelas sekali bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan keotentikan bangsa Indonesia, yang mana seharusnya nilai Pancasila sudah cukup menjadi rujukan pembelajaran dalam kurikulum 2013, sehingga potensi tergerusnya karakter yang buruk atau hilangnya sikap spiritualitas akan bisa diminimalisir

Posisi guru Pendidikan Kewarganegaraan yang harus juga menerapkan dan menilai aspek kognitif juga harus dapat menerapkan dan menilai aspek sikap, dimana individu personal guru Pendidikan Kewarganegaraan menjadi *role model*. sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang penerapannya memerlukan upaya lebih dari hanya sekedar aspek kognitif, memaksa guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk dapat mengimplementasikannya disekolah dan dikelas.

Dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ni Putu Arianthini dkk pada tahun 2014 pada kelas VII SMP Negeri 1 Singaraja mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual dan sosial diwujudkan pada komponen tujuan dan langkah-langkah pembelajaran serta komponen penilaian yang ada dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Kemudian implementasi pengintegrasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam pelaksanaan pembelajaran, ditunjukkan dengan adanya interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan siswa. Interaksi guru dengan siswa dilakukan dengan cara guru memberikan pemodelan, motivasi/dorongan, peringatan, teguran, arahan,

Soleh Solahudin, 2018

**UPAYA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIKAP SPIRITUAL (KI-1) DAN SIKAP SOSIAL (KI-2)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penugasan, dan penguatan kepada siswa agar menunjukkan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) saat mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kedua, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 1 Singaraja saat mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam pembelajaran meliputi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran. Hambatan dalam perencanaan, yaitu tidak adanya pedoman yang pasti tentang pengintegrasian sikap spiritual dan sosial dalam pembelajaran sehingga guru mengalami kesulitan dalam memilih kompetensi dasar dari sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang seberapa tepat diintegrasikan ke kompetensi dasar dari pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4). Hambatan dalam pelaksanaan terletak pada karakter setiap siswa. Siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan guru dalam mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu (Sri Jundiani, 2010: 281), nilai-nilai yang perlu dibangun dalam diri generasi penerus bangsa secara nasional yakni kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Sekolah bebas untuk memilih dan menerapkan nilai-nilai yang hendak dibangun dalam diri siswa. Bahkan pemerintah mendorong munculnya keragaman untuk pelaksanaan pendidikan karakter. Program-program di sekolah seperti pramuka, kantin kejujuran, sekolah hijau, olimpiade sains dan seni, serta kesenian tradisional, misalnya, telah sarat dengan pendidikan karakter. ternyata temuannya lebih banyak pada sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 memperoleh rata-rata sebesar 0,87% sedangkan sekolah yang menggunakan KTSP memperoleh hasil 0,55%, sedangkan untuk kemunculan sikap sosial lebih banyak dimunculkan oleh sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013, dengan rata-rata kemunculan sebesar 6,46% sedangkan untuk KTSP sebesar 5,93%.

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah bahwa peneliti sendiri ingin melihat seperti apa pengimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2), jika penelitian diatas lebih menekankan pengintegrasian sikap, sedangkan peneliti sendiri ingin melihat pengimplementasian dua sikap tersebut seperti apa

bentuk pengimplementasiannya baik sikap spiritual dan sikap sosial, keunggulan pengimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) di mata pelajaran PPKn, pentingnya pengimplementasian sikap spiritual dan sikap sosial, hingga kesulitan dan upaya pengimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang dilakukan oleh guru PPKn.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis merumuskannya dalam rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana guru mengimplementasikan sikap spritual (KI-1) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana guru mengimplementasikan sikap sosial (KI-2) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Mengapa pengimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) penting dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
4. Apakah keunggulan pengimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibandingkan dnegan mata pelajaran lain?
5. Bagaimana kesulitan dan upaya mengatasi kesulitannya dalam mengimplementasikan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) di SMPN 5 Kota Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan sikap spiritual (KI-1) yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan;
2. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan sikap sosial (KI-2) yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Memberikan informasi seberapa penting penerpan sikap spiritual (KI-1) dan penerpan sosial (KI-2) dalam mata pelajaran Pendidika Kewarganegaraan;

Soleh Solahudin, 2018

**UPAYA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIKAP SPIRITUAL (KI-1) DAN SIKAP SOSIAL (KI-2)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Untuk melihat keunggulan peimplementasian sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan;
5. Untuk mengetahui bagaimana dalam mengatasi kesulitan dan upayanya dalam mengimplementasikan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam pembelajaran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pengetahuan mengenai salah satu penerapan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan mengembangkan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta sebagai upaya meningkatkan dua karakter tersebut
- b. Bagi orangtua, penelitian ini dapat membantu orang tua untuk mengetahui tentang bentuk pengembangan sikap disekolah yang dilakukan oleh guru.
- c. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat agar membangkitkan motivasi pendidik agar dapat menerpakan atau mengimplementasikan bahkan dapat membentuk sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2)
- d. Bagi pengawas, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah refleksi agar dalam menyusun instrumen evaluasi pengawasan disesuaikan dengan perkembangan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) peserta didik
- e. Bagi sekolah atau kepala sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengoptimalkan dan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program yang dapat meningkatkan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2)

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terima kasih, nama dan kedudukan



tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapaun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu :

### **1.5.1 BAB 1: Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

### **1.5.2 BAB II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **1.5.3 BAB III: Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

### **1.5.4 BAB IV: Temuan dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

### **1.5.5 BAB V: Simpulan, Implikasi dan Saran**

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap

dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.